

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia

Debby Noor Muzdalifa*, Ria Haryatiningsih

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Debbynoormuzdalifa@gmail.com, Ria.haryatiningsih@gmail.com

Abstract. Destitutions is a serious problem in many countries, one of them is Indonesia which has different levels in every province. A way to reduce its number is by increasing the rate of economic growth marked by enhancement of Gross Domestic Regional Product (GDRP). And by increasing Human Development Index (HDI) through education, health and public purchasing strength. In addition, characteristics difference in each region can affect the destitutions pattern. This study aims to see the characteristics of the region will determine the destitutions pattern based on Klassen Tipologi. Second, this study aims to find out the influence and how the GRDP and HDI can change the number of destitutions in Indonesia. Regressions were done by using Panel Data through the Fixed Effect Method approach. Based on the results of the characteristic provincial study of the pattern region I, is a good domain because the destitutions level is below the national average, high rate of economic growth and higher HDI. Meanwhile, region IV is deficient domain because the level of destitutions is above the national average but has a lower rate of economic growth and HDI. Regression results show that GRDP has positive influence and insignificant effect to destitutions, while HDI enhancement has negative influence and significant effect to destitutions in 2011 to 2015.

Keywords: *Destitutions, Gross Domestic Regional Product (GDRP), Human Development Index (HDI).*

Abstrak. Kemiskinan merupakan permasalahan serius di berbagai negara, salah satunya Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda di berbagai provinsi setiap tahunnya. Salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian dengan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (IPM) melalui pendidikan, kesehatan serta daya beli masyarakat. Selain itu, perbedaan karakteristik di setiap wilayah dapat mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat karakteristik wilayah yang didasarkan pada LPE dan IPM akan menentukan pola kemiskinan yang didasarkan pada Tipologi Klassen yaitu terdapat wilayah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi atau rendah dari rata – rata kemiskinan tingkat Nasional. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta berapa besar perubahan PDRB dan IPM terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Regresi yang dilakukan menggunakan data Panel dengan pendekatan Fixed Effect Method. Berdasarkan hasil penelitian provinsi karakteristik wilayah pola I merupakan wilayah yang baik karena memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata Nasional dan laju pertumbuhan ekonomi serta IPM yang lebih tinggi. Sedangkan, wilayah IV merupakan wilayah yang kurang baik karena tingkat kemiskinan berada di atas rata-rata Nasional namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan IPM lebih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan peningkatan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan tahun 2011 sampai tahun 2015.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan serius di setiap Negara salah satunya Indonesia yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11.22 persen pada tahun 2015. Karakteristik wilayah yang berbeda dapat menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap kemiskinan di wilayah tersebut seperti lokasi geografis, kontribusi disetiap sektor, infrastruktur, serta kurangnya fasilitas pendukung dapat menghambat kegiatan ekonomi antar wilayah dan perkembangan fasilitas lainnya di wilayah tersebut. Indonesia memiliki persentase penduduk miskin yang berbeda di setiap wilayahnya disebabkan beberapa faktor ekonomi maupun non ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi yang rendah, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal dan pendidikan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi untuk pengetasan kemiskinan dengan cara perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi yang diterima sehingga berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri. Adanya peningkatan terhadap PDRB dan IPM diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dengan demikian tingkat kemiskinan akan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik wilayah di Indonesia yang digambarkan oleh LPE dan IPM menentukan pola kemiskinan di wilayah tersebut. Kedua mengetahui pengaruh PDRB dan IPM terhadap kemiskinan di Indonesia serta mengetahui berapa besar perubahan angka kemiskinan di Indonesia tahun 2011 – 2015.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat karakteristik wilayah yang didasarkan pada LPE dan IPM akan menentukan pola kemiskinan yang didasarkan pada Tipologi Klassen yaitu terdapat wilayah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi atau rendah dari rata – rata kemiskinan tingkat Nasional. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta berapa besar perubahan PDRB dan IPM terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Regresi yang dilakukan menggunakan data Panel dengan pendekatan Fixed Effect Method

Kemiskinan dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, tingkat pendapatan. Konsep kemiskinan pada dasarnya berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan batas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut juga dengan garis kemiskinan. Konsep ini dikenal sebagai kemiskinan mutlak atau absolut (Esmara, 1986).

United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu pertama, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan. Kedua, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*) dan rekreasi serta ketenangan hidup. Ketiga kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi jika kebutuhan primer dan kultural sudah terpenuhi dan ada kelebihan pendapatan.

Menurut Kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas

dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Terdapat hubungan positif antara IPM terhadap kemiskinan. Menurut Arsyad (2010) bahwa salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

<p style="text-align: center;">Wilayah IV</p> <p>Memiliki persentase penduduk miskin ↑ Laju Pertumbuhan Ekonomi ↓ Indeks Pembangunan Manusia ↓</p>	<p style="text-align: center;">Wilayah III</p> <p>Memiliki persentase penduduk miskin ↓ Laju Pertumbuhan Ekonomi ↑ Indeks Pembangunan Manusia ↑</p>
<p style="text-align: center;">Wilayah II</p> <p>Memiliki persentase penduduk miskin ↓ Laju Pertumbuhan Ekonomi ↓ Indeks Pembangunan Manusia ↓</p>	<p style="text-align: center;">Wilayah I</p> <p>Memiliki persentase penduduk miskin ↓ Laju Pertumbuhan Ekonomi ↑ Indeks Pembangunan Manusia ↑</p>

Gambar 1. Karakteristik dan Pola Kemiskinan Wilayah di Indonesia

Dalam penelitian ini karakteristik wilayah digambarkan oleh LPE dan IPM. Melalui laju pertumbuhan ekonomi kita dapat mengetahui bagaimana struktur ekonomi wilayah tersebut yang tentunya dipengaruhi lokasi dan kondisi geografis di wilayah tersebut. Sementara melalui IPM kita dapat gambaran tentang kondisi daya beli, tingkat kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut. Penetapan pola dilakukan dengan melakukan perbandingan tingkat karakteristik wilayah tersebut dengan rata-rata Nasional. Pola kemiskinan ini didasarkan pada tipologi klasen. Analisis dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 4 bagian berdasarkan perbandingan tingkat kemiskinan, LPE dan IPM dengan rata-rata Nasional. Wilayah satu merupakan wilayah yang paling baik karena memiliki persentase penduduk miskin di bawah rata-rata Indonesia tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi dan IPM diatas rata-rata Nasiona. Sementara wilayah IV merupakan wilayah yang kurang bagus karena memiliki persentase penduduknya tinggi namun memiliki LPE dan IPM yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional.

Provinsi yang berada di wilayah I yang memiliki persentase penduduk miskin rendah dan LPE yang tinggi pada tahun 2011 adalah provinsi Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Banten dan Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2015 yaitu provinsi Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, banten, Bali dan Kalimantan Timur.

Selain itu, provinsi yang berada di wilayah IV yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi dan LPE yang rendah pada tahun 2011 adalah provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Kemudian pada tahun 2015 yaitu semua provinsi kecuali provinsi Sumatera Barat yang mengalami pergeseran wilayah.

Provinsi yang berada di wilayah I merupakan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin rendah dan indeks pembangunan manusia yang tinggi di tahun 2011 yaitu provinsi Sumatera Utara, Riau, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Tahun 2015 yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kep Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, provinsi yang berada di wilayah IV yaitu provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi dan indeks pembangunan manusia yang rendah pada tahun 2011 adalah provinsi Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Tahun 2015 yaitu provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi barat, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Tabel 1. Hasil Hausman Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	74.268888	(32,130)	0.0000

Sumber : Hasil Estimasi Regresi

Berdasarkan hasil pengujian Hausman Test diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada Cross section F (0,0000) lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), artinya H_0 ditolak maka lebih tepat menggunakan FEM. Selain itu, asumsi lain untuk menggunakan FEM bahwa terdapat cross-section yang mencakup 33 provinsi dan time-series dalam kurun waktu lima tahun dimana $N > T$. Dengan demikian, pendekatan yang lebih tepat untuk mengestimasi sebuah regresi dalam data panel yaitu Fixed Effect Model.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model

Variabel	Koefisien	t-stat	Prob
C	57.56705	6.576062	0.0000
PDRB	2.58E-06	0.724679	0.4700
IPM	-0.680312	-4.973567	0.0000
Koef.Determinasi (R^2)		0.969852	
F-statistik		123.0005	
Prob (F-statistik)		0.000000	

Sumber : Hasil Estimasi Regresi

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi adalah koefisien yang menghitung berapa besar variasi dari variabel bebas (dependent) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel tidak bebas (independent). Adapun hasil dari koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0.969852 atau 97 persen. Artinya 97 persen variasi pada tingkat kemiskinan (variabel terikat) bisa dijelaskan oleh variabel PDRB dan variabel IPM (variabel bebas), sementara sisanya 0.3 persen ditentukan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model.

Uji T-statistik

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam menguji t-statistik menggunakan tingkat signifikansi 5 persen atau $\alpha=0.05$. Hasil perhitungan uji t-statistik ini yaitu membandingkan antara probabilitas t-statistik dengan tingkat signifikansi ($\alpha=0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai probabilitas untuk PDRB sebesar 0.4700. Apabila diujikan dengan α sebesar 5 persen maka hipotesis H_0 yang menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat akan diterima. Namun apabila digunakan tingkat α lebih besar dari 0,47 (misalnya $\alpha = 0,48$) maka probabilitasnya akan lebih kecil dari tingkat α sehingga hipotesis H_0 berada di daerah penolakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
2. Nilai probabilitas untuk IPM sebesar 0.0000 secara nyata lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5 persen atau ($\alpha=0.05$) maka artinya H_0 berada di daerah penolakan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Uji F-Statistik

Uji F-statistik dilakukan untuk menunjukkan adanya pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau menyeluruh. Untuk hasil perhitungan uji F-statistik yaitu dengan cara membandingkan antara probabilitas f-statistik dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha=0.05$). nilai probabilitas yang didapat sebesar 0.00000, sehingga akan didapat kesimpulan bahwa nilai probabilitas untuk variabel bebas lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha=0.05$) maka artinya H_0 berada didaerah penolakan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (independent) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan selama periode 2011-2015.

Daerah yang termasuk memiliki nilai intersep lebih rendah dibandingkan daerah secara keseluruhannya adalah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kep.Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sebagian besar pada wilayah ini memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah dibandingkan yang lain, dan perubahan persentase penduduk miskin namun tidak terlalu signifikan serta besar kecilnya PDRB dan IPM. Sedangkan 15 daerah lainnya memiliki intersep positif dimana rata-rata perubahan tingkat kemiskinan daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata perubahan tingkat kemiskinan secara keseluruhan.

Uji Asumsi Klasik : Multikolinier

Asumsi dasar model regresi linier yang pertama ini adalah tidak terjadinya multikolinier, artinya antara variabel bebas tidak terjadi keterkaitan yang kuat. Pada persamaan ini telah terbebas dari masalah heteroskedastis dan autokolerasi (hal ini karena dalam menggunakan analisis data panel dimana terdapat 165 data observasi, sehingga diasumsikan tidak terkena masalah heteroskedastis dan autokolerasi). Dengan demikian pada penelitian ini hanya dilakukan pengujian Mutikolinier. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian multikolinier dalam penelitian ini;

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinier

Persamaan	Hasil R^2
$P = f(\text{PDRB, IPM})$	0.969852
$\text{PDRB} = f(\text{IPM})$	0.035708
$\text{IPM} = f(\text{PDRB})$	0.161656

Sumber : Hasil Perhitungan Multikolinier

Dari hasil estimasi dengan menggunakan kolerasi parsial berdasarkan kaidah *rule of thumb* dimana membandingkan R^2 untuk persamaan pertama dengan R^2 untuk kolerasi masing-masing variabel bebasnya bahwa tidak terdapat penyakit pada uji asumsi klasik. Hal tersebut karena R^2 untuk persamaan keseluruhan lebih besar dari pada R^2 untuk kolerasi masing-masing variabel bebas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinier.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pola kemiskinan, proses pengolahan data dan hasil estimasi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pola kemiskinan, wilayah yang berada pada pola I memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata Nasional, laju pertumbuhan ekonomi dan IPM diatas rata-rata Indonesia salah satunya adalah provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan. Struktur ekonomi yang dominan ada pada sektor tersier. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian DKI Jakarta telah di dominasi oleh sektor yang memiliki nilai tambah yang cukup tinggi. Dengan adanya fasilitas yang dimiliki seperti infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, dan transportasi baik darat, laut, udara memudahkan dalam kegiatan ekonomi antara wilayah. Keunggulan sektor tersier adalah memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, memunculkan potensi yang dimiliki tiap daerah, memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan dan sebagainya. Hal ini dapat menarik masyarakat untuk berpindah dan mencari pekerjaan ke wilayah karena memiliki fasilitas yang lengkap.
2. Sedangkan wilayah yang berada pada pola IV memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata Nasional namun memiliki laju pertumbuhan ekonominya dan IPM yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional salah satunya adalah provinsi Papua. Jika persentase penduduk miskin dihubungkan dengan karakteristik wilayah, Papua yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dan memiliki luas wilayah terbesar di Indonesia sekitar 16.67 persen dari wilayah Indonesia, namun memiliki jumlah penduduk sekitar 1.20 persen dari total penduduk Indonesia. Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di provinsi Papua terkonsentrasi di daerah pedesaan dimana pada Maret 2015 terdapat 36.66 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan, sedangkan di perkotaan hanya 4.61 persen. Apabila dilihat dari struktur ekonomi Papua dominan di sektor primer. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Papua masih di dominasi oleh sektor yang nilai tambahnya rendah. Kegiatan produksi yang memiliki nilai tambah yang rendah cenderung miskin. Mayoritas penduduk Papua bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan dan perikanan. Apabila dilihat dari sumber pendapatan daerahnya berada di sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu muncul beberapa masalah lain seperti terjadinya ketimpangan pembangunan yang disebabkan karena persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan daerah yang sangat luas. Kedua, terjadinya kemiskinan disebabkan oleh tidak adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah Papua sedangkan pusat-pusat kegiatan pembangunan atau perekonomian hanya di daerah tertentu.
3. Selama periode 2011 – 2015, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 0,4700. Sementara dari koefisien regresinya menunjukkan bahwa setiap penambahan PDRB sebesar 1 Miliar Rupiah berarti terjadi peningkatan terhadap kemiskinan sebesar 2.58 persen.
4. Selama periode 2011 – 2015, menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 0,0000. Sementara dari koefisien regresinya menunjukkan bahwa setiap kenaikan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0498 persen.

Daftar Pustaka

- [1] Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [2] Rohaeti dan Sundaya. 2006. *BAPEDA Provinsi Jawa Barat, Bandung. Kajian Sektor-Sektor Ekonomi yang Berdampak Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Jawa Barat Pendekatan Social Accounting Matrices*.
- [3] Amijaya. 2008. Universitas Diponegoro, Semarang. *Pengaruh Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003 – 2004*.
- [4] Bungin. 2005. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [5] Fadlilah. 2016. Universitas Jendral Soedirman, Jawa Tengah. *Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013*.
- [6] Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- [7] Haviz. Julia. Haryatiningsih. 2015. *Modul Laboratorium Ekonometrika*, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- [8] Hartomo dan Aziz. 2009. *Kemiskinan di Ibukota*. Jakarta: Pustaka Media.
- [9] Hudaya. 2009. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [10] Human Development Report. 1995. *Published for the United Nations Development Programme (UNDP)*. New York: Oxford University.
- [11] Drewnowski and Scott. 1966. *The Level of Living Index*. Geneva : United Nation Research Institute for Social Development, UNRISD.
- [12] Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [13] Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [14] *Kementrian Dalam Negeri RI, 2016, Luas Wilayah Indonesia*, Jakarta
- [15] Margareta. 2014. *Analisis Karakteristik Rumah Tangga Miskin Antar Wilayah Di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- [16] Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [17] Nasikun. 2005. *Dalam Suryawati, Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gramedia Insani.
- [18] Sharp et.al. 2000. *Economic of Social Issues 14th edition*. New York: Irwin/McGraw-Hill.
- [19] Siregar. 2007. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Online <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Siregar21agts07.pdf> Diakses tanggal 9 Juli 2017.
- [20] Siregar dan Wahyuniarti. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Online at http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf Diakses tanggal 15 Juli 2017.
- [21] Suryadiningrat. 2009. *Kemiskinan di Ibukota*. Jakarta: Pustaka Media.
- [22] Sukirno. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [23] Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- [24] Sundaya. 2004. Universitas Islam Bandung: Bandung. *Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas Pembangunan Manusia Di Jawa Barat*.
- [25] Suparlan. 1984. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [26] Surip. 2007. *Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Faktor Penyebabnya*. Jakarta: BPS.
- [27] Sajogyo. 1997. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Bogor: LPSB-IPB.
- [28] Tambunan. 2003. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Penerbit Erlangga: Jakarta.

- [29] Tambunan. 2001. Transformasi Ekonomi Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [30] Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- [31] Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- [32] Todaro dan Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- [33] World Bank. 2006. Making the New Indonesia Work for the Poor.
- [34] Yunitasari. 2007. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.
- [35] Badan Pusat Statistik, 2016, Data dan Informasi Kemiskinan, Jakarta.
- [36] _____, 2015, Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi.
- [37] _____, 2016, PDRB Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha.
- [38] _____, 2016, Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Provinsi.
- [39] _____, 2016, Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi.
- [40] _____, 2016, Perhitungan dan Analisis Makro Kemiskinan Makro Indonesia.
- [41] _____, 2016, Definisi Kemiskinan, Jakarta.